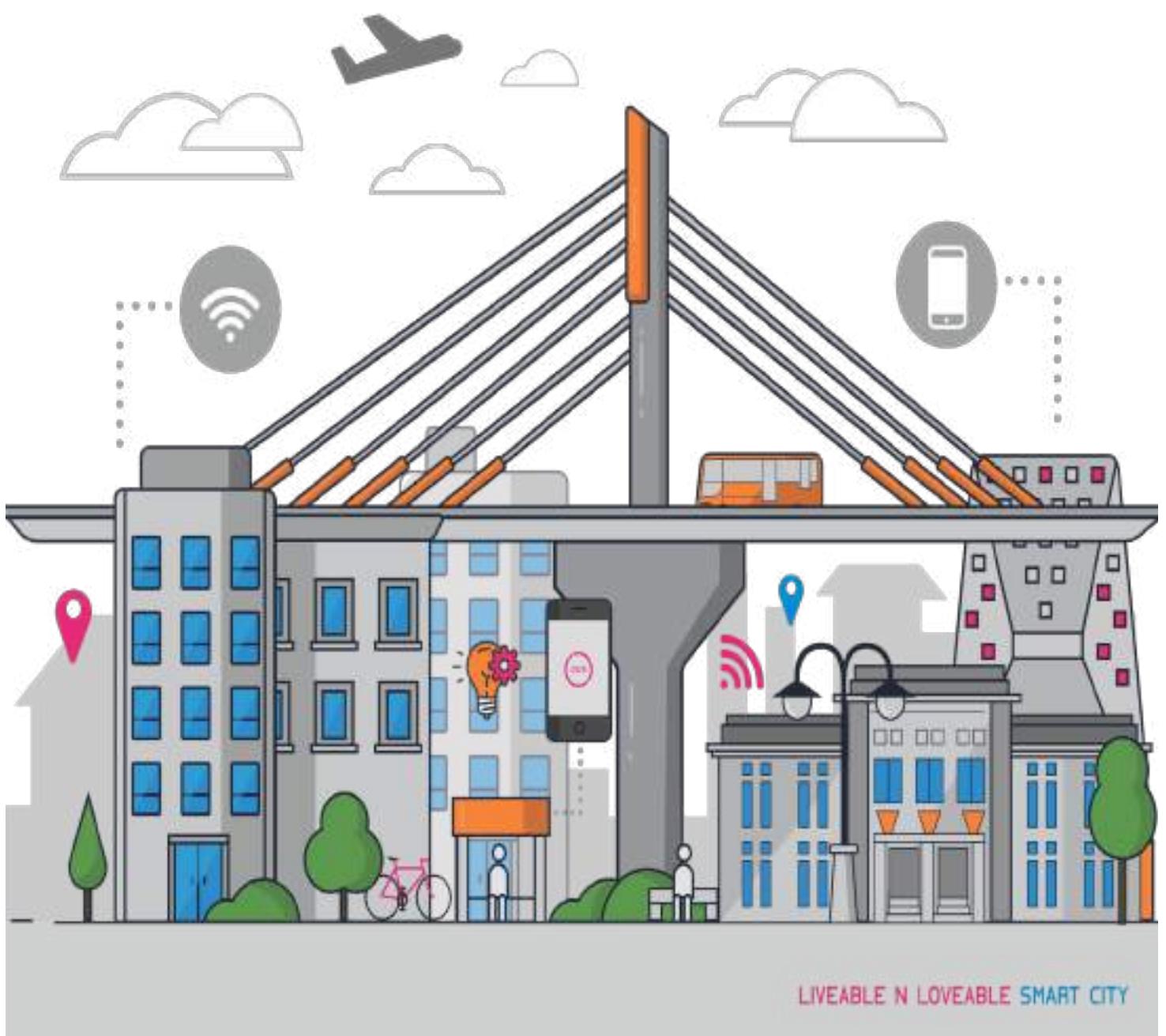




RENCANA KERJA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

TAHUN 2024



Jl. Wastukencana No.2 Bandung

Tlp.022-4234892, email diskominfo@bandung.go.id



KATA PENGANTAR

Dalam upaya meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, khususnya dalam rencana tahunan. Disusunlah Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024. Penyusunan Rencana Kerja ini juga memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kota Bandung Tahun 2024.

Buku Rencana Kerja Tahunan ini diharapkan dapat menjadi acuan atau pedoman dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan lebih berdaya guna dan berhasil guna, bertanggung jawab serta untuk lebih memanfaatkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.

Namun demikian kita menyadari dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan ini masih terdapat kekurangan-kekurangan yang perlu disempurnakan. Oleh karena itu didalam implementasinya diharapkan bukan hanya mengacu kepada rencana tahunan ini, tetapi juga mampu berkembang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan pelayanan kepada masyarakat.

Bandung, 9 Agustus 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA





Daftar Isi

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Lampiran Tabel	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2022	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022 dan Capaian Renstra.....	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika	18
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika	23
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	24
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	34
BAB III TUJUAN, SASARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	35
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	35
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika	39
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	41



BAB V PENUTUP

51

Lampiran-lampiran Tabel

	Halaman
Tabel 2.1.....	11
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun 2023	
Tabel 2.2.....	20
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung	
Tabel 2.3.....	25
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 Kota Bandung	
Tabel 3.1.....	40
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024	
	40
Tabel 3.2	44
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seiring dengan bergulirnya era globalisasi yang berlangsung cepat dan momentum implementasi kebijakan Otonomi Daerah sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka telah terjadi perubahan yang signifikan, baik dalam tatanan maupun system Pemerintahan kita, terutama terlihat dalam perubahan paradigma, pemahaman konsep dan implementasi penyelenggaraan Pemerintahan.

Perubahan Undang-undang Otonomi Daerah dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mempertegas kembali bahwa penyelenggaraan Otonomi Daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

Dalam rangka mendukung percepatan implementasi kebijakan Otonomi Daerah, peran serta setiap Instansi Pemerintah Daerah sangat penting dan akan sangat menentukan pelaksanaan Otonomi di daerah, sebab dalam rangka Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan yang sangat luas, untuk mengatur urusan rumah tangganya. Dengan demikian setiap organisasi Pemerintah Daerah harus melaksanakan teknis penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah memegang peranan yang sangat strategis, yang harus dioptimalkan dalam pelaksanaan Otonomi Daerah.

Pelaksanaan Otonomi Daerah saat ini telah memberi peluang pada Pemerintah Kota Bandung untuk melaksanakan berbagai kewenangan yang lebih luas dalam rangka mengurus rumah tangga daerah. Pada saat yang sama masyarakat pun diberi peluang yang lebih besar untuk mengembangkan aspirasi dan prakarsanya dalam rangka pembangunan daerah.

Disamping itu pula penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan pada amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Pada Pasal 13 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yakni: Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Pada Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mengamanatkan bahwa perangkat daerah harus menyusun Renstra, Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Berdasarkan Pasal 126 Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Selanjutnya Rencana Kerja yang disusun menjadi dasar dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA). Setelah anggaran ditetapkan melalui mekanisme pembahasan antara pemerintah dengan DPRD (menjadi dokumen pelaksanaan anggaran/ DPA), maka instansi pemerintah membuat rencana operasional, dan selanjutnya membuat perjanjian kinerja (Penetapan Kinerja) dengan atasan langsungnya, di mana penetapan kinerja ini akan digunakan sebagai dasar dalam melakukan evaluasi kinerja. Pada akhir periode dilakukan pengukuran kinerja untuk selanjutnya dilaporkan dalam Laporan Kinerja Tahunan Instansi Pemerintah (LKIP).

Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai lembaga staf dan *advisory* adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah yang melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah di Bidang Komunikasi dan Informasi, Statistik, dan Persandian, berdasarkan asas otonomi dan pembantuan. Selain itu berfungsi melaksanakan perumusan kebijakan teknis dibidang Komunikasi dan Informasi, Statistik, dan Persandian; yang meliputi; Perencanaan komunikasi, diseminasi informasi, teknologi informasi, Persandian (Keamanan Aplikasi); melaksanakan pelayanan teknis administrasi Dinas; dan melaksanakan tugas yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung dan Peraturan Walikota Bandung Nomor 160 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung Tahun 2024 berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 470);

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung Tahun 2024 adalah dalam rangka melaksanakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Tujuan penyusunan Rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung Tahun 2024 adalah :

- 1) Menyajikan capaian kinerja pelayanan tahun lalu sebagai dasar penyusunan rencana Tahun 2024;
- 2) Menyajikan isu strategis, tujuan dan sasaran perangkat daerah sebagai fokus pelayanan yang akan diwujudkan dan dikedepankan;
- 3) Menjadikan tolok ukur penilaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
- 4) Sebagai acuan dalam menyusun rencana anggaran berbasis kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung Tahun 2024.
- 5) Sebagai panduan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai sasaran.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung Tahun 2024 disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, Serta Tata cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Menguraikan tentang Gambaran Umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, latar belakang, landasan hukum penyusunan, Maksud dan tujuan dan sistematika penyusunan RENJA.

BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022

Menguraikan tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD, Analisis Kinerja Pelayanan PD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Menguraikan tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Renja PD

Bab IV Rencana Kerja dan pendanaan Perangkat Daerah

Menguraikan rencana kerja dan pendanaannya perangkat daerah dan perkiraan maju

BAB V Penutup

Berisi kesimpulan dari Rencana Kerja tahunan



BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung pada Tahun 2022 telah melaksanakan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar yaitu Bidang Komunikasi dan Informasi, Statistik dan Persandian. Terhadap urusan tersebut akan evaluasi sebagai berikut;

Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

A. PROGRAM: PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, sub kegiatan ini sebesar Rp. 337.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 332.900.100,- (98,78%);
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, sub kegiatan ini sebesar Rp. 16.390.499.961,- terealisasi sebesar Rp.15.450.512.699,- (94.27%);
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah
 - a. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas berserta atribut dan kelengkapannya, Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 84.562.500,- terealisasi sebesar Rp. 83.985.000,- (99,32%);

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor, Sub Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 413.974.490,- terealisasi sebesar Rp. 400.164.750,- (96,66%);
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Perakatan Rumah Tangga, Sub Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 80.431.140,- terealisasi sebesar Rp. 79.492.850,- (98,83%);
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Sub Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp.121.072.390,- terealisasi sebesar Rp. 119.100.750,- (98,37%);
- d. Sub Kegiatan Barang Cetakan dan Penggandaan, Sub Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp.180.078.400,- terealisasi sebesar Rp. 174.274.486,- (96,78%);
- e. Sub Kegiatan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Sub Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp.69.910.000,- terealisasi sebesar Rp. 62.453.750,- (89,33%);
- f. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu, Sub Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 206.628.720,- terealisasi sebesar Rp. 206.462.300,- (99,92%);
- g. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Sub Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 213.318.480,- terealisasi sebesar Rp. 212.996.577,- (99,85%).

4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Sub Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 51.757.500,- terealisasi sebesar Rp.40.738.628,- (78,71%)
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Sub Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 743.688.000,- terealisasi sebesar Rp. 743.544.000,- (99,98%).

5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Sub Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 823.019.000,- terealisasi sebesar

Rp. 800.223.400,- (97.23%);

- b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Sub Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 120.433.000,- terealisasi sebesar Rp. 118.985.000,- (98.80%);
- c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan pagu anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 200.000.000,- (96,90%).

B. PROGRAM: PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

1. Kegiatan Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, ada 4 sub kegiatan, yaitu;
 - a. Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik, Sub Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.314.317.500,- terealisasi sebesar Rp. 1.300.684.685,- (98,96%);
 - b. Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik, Sub Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 882.022.100,- terealisasi sebesar Rp. 845.202.880,- (95,83%);
 - c. Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik, Sub Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 4.519.538.200,- terealisasi sebesar Rp. 4.400.673.693,- (97,37%);
 - d. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas, Sub Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 4.505.149.776,- terealisasi sebesar Rp. 4.479.359.080,- (99,43%).

C. PROGRAM : PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA

1. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu;
 - a. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah, Sub Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 7.613.481.456,- terealisasi sebesar Rp. 6.554.874.605,- (86,10%).

2. Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan, , yaitu;
- a. Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.003.907.500,- terealisasi sebesar Rp. 981.567.002,- (97.77%);
 - b. Sub Kegiatan Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik, Sub Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp.217.904.000,- terealisasi sebesar Rp.217.604.100,- (99,86);
 - c. Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi data dan Informasi Elektronik, Sub Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 296.681.980,- terealisasi sebesar Rp. 295.843.125,- (99,72%);
 - d. Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik, Sub Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.528.420.500,- terealisasi sebesar Rp. 1.300.623.923,- (85,10%);
 - e. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah, Sub Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 4.351.126.330,- terealisasi sebesar Rp. 4.106.048.124,- (94,37%);
 - f. Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas, Sub kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 154.842.400,- terealisasi sebesar Rp. 154.831.780,- (99,99%);
 - g. Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah, Sub Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 248.777.600,- terealisasi sebesar Rp. 248.658.690,- (99,95%).

D. PROGRAM : PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

- 1.Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu;

- a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik, Sub Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 141.317.300,- terealisasi sebesar Rp. 138.733.650,- (98,17%);
- b. Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi, Sub Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 203.120.000,- terealisasi sebesar Rp. 202.932.250,- (99,91%);
- c. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektorat di Daerah, Sub Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 101.560.000,- terealisasi sebesar Rp. 101.506.900,- (99,95%).

E. PROGRAM : PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

1. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan, yaitu;
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Daerah, Sub Kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 250.950.000,- terealisasi sebesar Rp. 250.270.650,- (99,73%).

Dari hasil kinerja program dan kegiatan yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022 sesuai dengan target yang telah ditentukan, terutama untuk mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) Diskominfo.

Untuk lebih jelas dalam evaluasi pelaksanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 2.1 di bawah ini;

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2023 (tahun berjalan) Kota Bandung

Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/Kegiatan (<i>Output</i>)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022 (n-2)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun 2023(n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan			
					Target Renja PD tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja PD tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)		
2	16											
2	16	03			3.35	3.61	3.30	3.61	115%	3.35	0,15	100,00

						Nilai Penerapan SPBE lingkup Aplikasi	31,55	36,65	31,50	36,65	116,35	31,55	83,82	265,66
						Nilai Penerapan SPBE lingkup Perencanaan, Eveluasi dan Pengembangan	22,60	17,72	22,50	22,82	101,42	22,60	21,05	93,13
						Nilai Penerapan SPBE lingkup Infrastruktur	4,70	3,60	4,60	5,00	108,70	4,70	4,43	94,33
2	16	03	2,01		Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Sub Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	5	3	1	1	100	1	5,00	100,00
2	16	03	2,01	03	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	- Jumlah lokasi dilengkapi wifi dan atau CCTV serta Jumlah interkoneksi antar Perangkat Daerah/Sekolah/puskemas	2704	2143	200	200	100	200	2.543,00	94,05
2	16	03	2,02		Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sub Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	35	21	7	7	100	7	35,00	100,00
2	16	03	2,02	01	Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e- government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	- Jumlah server yang terintegrasi di Pemerintah Kota Bandung	204	150	34	34	100	34	218,00	106,86

2	16	03	2,02	02	Sub Kegiatan Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintah Berbasis Elektronik	- Jumlah laporan Perencanaan TIK	10	6	2	2	100	2	10,00	100,00
2	16	03	2,02	06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi elektronik	- Jumlah aplikasi yang diintegrasikan	20	12	4	4	100	4	20,00	100,00
2	16	03	2,02	07	Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	- Jumlah aplikasi yang dikelola	25	15	5	5	100	5	25,00	100,00
2	16	03	2,02	08	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	- jumlah laporan hasil pengendalian dan pengembangan infrastruktur publik	5	3	1	1	100	1	5,00	100,00
2	16	03	2,02	09	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	- Jumlah laporan hasil evaluasi TIK	10	6	2	2	100	2	10,00	100,00
2	16	03	2,02	10	Sub kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	- Jumlah dokumen pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Kota Bandung	10	6	2	2	100	2	10,00	100,00
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK									
2	20	02			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Nilai Penerapan SPBE lingkup Data dan Statistik	3,9	2,70	3,50	3,90	111,43	3.90	6,79	174,04
2	20	02.2	01		Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sub Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	15	9	3	3	100	3	15,00	100,00

2	20	02.2	01	01	Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	- Jumlah publikasi data dan infografis	5	3	1	1	100	1	5,00	100,00
2	20	02.2	01	02	Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	- Jumlah Data Terbuka Terstandar	5	3	1	1	100	1	5,00	100,00
2	20	02.2	01	06	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	- Jumlah Dokumen Statistik Sektoral	5	3	1	1	100	1	5,00	100,00
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN									
2	21	02			Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Nilai Penerapan SPBE lingkup Persandian	1,37	1,20	1,20	1,20	100,00	1.37	2,47	180,10
2	21	02.2	01		Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sub Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5	3	1	1	100	1	5,00	100,00
2	21	02.2	01	04	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	- Jumlah aplikasi yang diaudit keamanannya	50	37	7	10	142,86	7	54,00	108,00
2	16				URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
2	16	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	500	200	100	100	100	100	400,00	80,00

2	16	01.2	01		Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	2	1	1	100	1	4,00	100,00
2	16	01.2	01	07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah layanan data/informasi Program/kegiatan Diskominfo	6	3	2	2	100	1	6,00	100,00
2	16	01.2	05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	5	1	1	1	100	1	3,00	60,00
2	16	01.2	05	02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas	5	3	1	1	100	1	5,00	100,00
2	16	01.2	06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	35	21	7	7	100	7	35,00	100,00
2	16	01.2	06	02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah laporan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor terdida	60	36	12	12	100	12	60,00	100,00
2	16	01.2	06	03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah tangga	- Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga	60	36	12	12	100	12	60,00	100,00
2	16	01.2	06	04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK dan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	60	36	12	12	100	12	60,00	100,00
2	16	01.2	06	05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	20	16	2	2	100	2	20,00	100,00

2	16	01.2	06	06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah laporan bulanan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	60	36	12	12	100	12	60,00	100,00
2	16	01.2	06	08	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	- Jumlah Laporan bulanan Penyediaan Makanan Dan Minuman Tamu	60	36	12	12	100	12	60,00	100,00
2	16	01.2	06	09	Sub Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Jumlah Laporan bulanan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	60	36	12	12	100	12	60,00	100,00
2	16	01.2	08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sub Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10	6	2	2	100	2	10,00	100,00
2	16	01.2	08	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	60	36	12	12	100	12	60,00	100,00
2	16	01.2	08	04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan jasa pelayanan umum kantor	60	36	12	12	100	12	60,00	100,00
2	16	01.2	09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sub Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15	9	3	3	100	3	15,00	100,00
2	16	01.2	09	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Jumlah Unit Kendaraan Yang Dibayarkan Jasa pemeliharaan dan Perijinannya	140	106	28	28	100	28	162,00	115,71
2	16	01.2	09	06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Jumlah unit perbaikan peralatan kantor	60	36	12	12	100	12	60,00	100,00
2	16	01.2	09	09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah unit gedung kantor yang dipelihara	5	3	1	1	100	1	5,00	100,00

2	16	02			Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Nilai Penerapan SPBE lingkup Layanan Informasi	2,20	2,00	2,00	2,00	100,00	2.20	1,37	62,08
						Cakupan pengaduan masyarakat melalui LAPOR yang ditindaklanjuti	100%	99,43	100	99,43	99,43	100	99,62	99,62
						Nilai layanan informasi masyarakat melalui radio	0,6	0,5	0,5	0,5	100,00	0,6	0,53	88,89
						Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Radio Sonata	88,31	82,35	85	85	100,00	88,31	85,22	96,50
2	16	02	01		Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sub kegiatan pengelolaan dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota	20	12	4	4	100	4	20,00	100,00
2	16	02	01	02	Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	- Jumlah layanan penyuluhan dan pengendalian informasi	15	9	3	3	100	3	15,00	100,00
2	16	02	01	05	Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	- Jumlah Studio Radio yang dikelola	10	6	2	2	100	2	10,00	100,00
2	16	02	01	06	Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	- Jumlah layanan informasi publik	20	12	4	4	100	4	20,00	100,00
2	16	02	01	12	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	- Jumlah sosialisasi dan pembinaan kepada Masyarakat, Mitra dan Relawan	20	12	4	4	100	4	20,00	100,00

Sumber : Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Analisis kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung yang tercantum dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan target. Ada 4 indikator Indikator Kinerja Utama, Pada Tahun 2022 dari 4 indikator ini ada 1 indikator yang melebihi target yaitu; Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); 3 indikator yang sesuai target yaitu; Prosentase data yang disampaikan kepada masyarakat secara terbuka; Prosentase Perangkat Daerah yang menggunakan persandian yang terkendali dan Indeks Kepuasan Masyarakat.

Untuk Tahun 2022 dari target 4 indikator ini diharapkan dapat terealisasi sesuai dengan target, sedangkan proyeksi tahun 2023 yang merupakan akhir dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) diproyeksikan juga optimis dapat terealisasi dengan baik.

Analisis Indikator Kinerja Kunci Kota Bandung yaitu ada 8 indikator yang terdiri dari 3 urusan, yaitu;

1. Urusan Komunikasi dan Informatika ada 5 indikator, namun sesuai dengan urusannya Dinas Komunikasi dan Informatika hanya memiliki kewenangan 1 indikator saja yaitu Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di tingkat kecamatan, sedangkan 4 indikator lagi kewenangannya ada pada Kantor BPS Kota Bandung.

Pada tahun 2019 BPS Kota Bandung tidak mensurvei sesuai dengan indikator tersebut sehingga tidak ada data yang dapat disajikan pada IKK ini.

Urusan Statistik ada 2 indikator, kesemuanya dapat terealisasi sesuai dengan target.

Urusan Persandian ada ada 2 indikator, kesemuanya dapat terealisasi sesuai dengan target.

Untuk lebih jelas dalam Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung dari tahun ke tahun dapat dilihat pada Tabel 2.2 di bawah ini;

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Bandung

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020 (Thn n-2)	Tahun 2021 (Thn n-1)	Tahun 2022 (thn n)	Tahun 2023 (thn n+1)	Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)			3,01	3,25	3,30	3,35	3,19	3,61	3,35	3,5	IKU 2019-2023
2	Jumlah data yang disampaikan kepada masyarakat secara terbuka			45%	55%	65%	75%	55%	65,02%	75%	NA	IKU 2019-2023
3	Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan persandian yang terkendali			62,50%	78,12%	93,75%	100%	78,12%	93,75%	100%	NA	IKU 2019-2023
4	Indeks Kepuasan Masyarakat			79	82	85	88,31	85,19%	85,53%	88,31	88,40	IKU 2019-2023

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020 (Thn n-2)	Tahun 2021 (Thn n-1)	Tahun 2022 (thn n)	Tahun 2023 (thn n+1)	Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2022 (thn n)	Tahun 2023 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Indikator Kinerja Kunci Kota Bandung									
1			Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di tingkat Kecamatan	100	100	100	100	100%	100%	100	100	
2			Cakupan Layanan Telekomunikasi	84.00	88.00	90.00	95.00	NA	NA	88.00	90.00	Kantor BPS Kota Bandung tidak lagi mendata layanan telekomunikasi
3			Prosentase penduduk yang menggunakan HP/telephon	88.49	90.20	92.05	93.89	NA	NA	90.20	92.05	
4			Proporsi rumah tangga dengan akses internet	94.65	94.84	95.03	95.22	NA	NA	94.84	95.03	
5			Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	24.19	22.79	21.39	20	NA	NA	21.39	20	
6			Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	
7			Data Basis Pembangunan Daerah	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	

8			Prosentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat daerah	62,50	78,12	93,75	100%	62,50	NA	93,75	100%	
---	--	--	--	-------	-------	-------	------	-------	----	-------	------	--

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Untuk dapat mencapai penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung masih keterkaitan dengan baik dengan tingkat provinsi atau kabupaten dan kota lain maupun tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan.

Keterkaitan ini menjadi peluang eksternal Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan kinerja pembangunan, yaitu;

1. Adanya aturan UU tentang keterbukaan informasi publik;
2. Adanya konsep smart city sebagai kebijakan pemerintah pusat;
3. Kota Bandung yang strategis sebagai pusat kegiatan pendidikan, bisnis dan pusat pemerintahan Jawa Barat;
4. Meningkatnya jumlah perangkat daerah di lingkungan Pemkot Bandung yang menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi serta standarisasi aplikasi di Pemkot Bandung;
5. Kemudahan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat dan Instansi Pemerintah lain;
6. Perkembangan IPTEK yang pesat, dukungan serta peran serta masyarakat yang dapat lebih mempercepat peningkatan kinerja pada era globalisasi;
7. Adanya komitmen pimpinan dan jajaran dalam penyelenggaraan program dan kegiatan.

Sedangkan tantangan atau ancaman eksternal yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam pelaksanaan kinerja pembangunan ini, yaitu.

1. Pelaksanaan Bandung Smart City secara eksternal belum didukung maksimal;
2. Belum semua kinerja pelayanan publik sesuai harapan;
3. Belum adanya standarisasi aplikasi integrasi;
4. Tingkat literasi internet belum merata;
5. Belum optimalnya keamanan data;
6. Kemampuan Sumber Daya Manusia terkait Teknologi Informasi dan Komunikasi di Perangkat Daerah masih perlu ditingkatkan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024, merupakan pedoman untuk penyusunan rancangan Renja PD. Rancangan Renja PD merupakan kebijakan Top Down Planning yaitu kebijakan yang harus mengikuti arah kebijakan dari pusat dan juga harus melaksanakan Up Down Planning yaitu harus mengadopsi usulan dari masyarakat sehingga PD nantinya menyelaraskan antara usulan dari bawah dan menyelaraskannya dengan kebijakan dari atas. Berdasarkan Perda No. 5 tahun 2009 usulan hasil Musrenbang dan reses Dewan harus bisa diakomodir minimal sebesar 30%.

Untuk lebih jelas review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kota Bandung dapat dilihat pada Tabel 3 di bawah ini;

Tabel 2.3

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kota Bandung

Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				61.693.726.682	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				61.693.726.682
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Bandung	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	23.690.104.288	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Bandung	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	23.690.104.288
I	Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Sub Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Sub Kegiatan	220.000.000	Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Sub Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Sub Kegiatan	220.000.000
1	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	220.000.000	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	220.000.000
II	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah sub kegiatan administrasi keuangan Perangkat Daerah	12 Laporan	20.066.969.940	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah sub kegiatan administrasi keuangan Perangkat Daerah	12 Laporan	20.066.969.940
2	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Dokumen	20.066.969.940	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Dokumen	20.066.969.940

III	Kegiatan Administrasi Kpegawiaian Perangkat Daerah		Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Kpegawiaian Perangkat Daerah	1 Sub Kegiatan	68.653.778	Kegiatan Administrasi Kpegawiaian Perangkat Daerah		Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Kpegawiaian Perangkat Daerah	1 Sub Kegiatan	68.653.778
3	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	68.653.778	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	68.653.778
IV	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Sub Kegiatan	1.047.368.010	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Sub Kegiatan	1.047.368.010
4	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 laporam	192.361.460	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 laporam	192.361.460
5	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 paket	88.284.920	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 paket	88.284.920
6	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yan disediakan	5 paket	118.836.540	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yan disediakan	5 paket	118.836.540
7	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan pengadaan yang Disediakan	2 paket	219.214.890	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan pengadaan yang Disediakan	2 paket	219.214.890
8	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 laporam	76.890.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 laporam	76.890.000

9	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan bulanan Penyediaan Makanan Dan Minuman Tamu	12 laporam	139.131.500	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan bulanan Penyediaan Makanan Dan Minuman Tamu	12 laporam	139.131.500
10	Sub Kegiatan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporam	212.648.700	Sub Kegiatan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporam	212.648.700
V	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah sub Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Sub Kegiatan	950.838.680	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah sub Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Sub Kegiatan	950.838.680
11	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporam	124.025.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporam	124.025.000
12	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan layanan kebersihan dan keamanan kantor	12 laporam	826.813.680	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan layanan kebersihan dan keamanan kantor	12 laporam	826.813.680
VI	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah sub Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Sub Kegiatan	1.336.273.880	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah sub Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Sub Kegiatan	1.336.273.880

13	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Yang Dibayarkan Jasa pemeliharaan dan Perijinannya	28 Unit	997.236.130	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Yang Dibayarkan Jasa pemeliharaan dan Perijinannya	28 Unit	997.236.130
14	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah laporan unit perbaikan peralatan kantor	12 laporam	119.037.750	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah laporan unit perbaikan peralatan kantor	12 laporam	119.037.750
15	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya		Jumlah unit Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung	1 Unit	220.000.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya		Jumlah unit Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung	1 Unit	220.000.000
B	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		Nilai Penerapan SPBE lingkup Layanan Informasi	2,4	8.628.679.516		Nilai Penerapan SPBE lingkup Layanan Informasi	2,4	8.628.679.516	
			Cakupan pengaduan masyarakat melalui LAPOR yang ditindaklanjuti	100%			Cakupan pengaduan masyarakat melalui LAPOR yang ditindaklanjuti	100%		
			Nilai layanan informasi masyarakat melalui radio	0,4	970.224.310		Nilai layanan informasi masyarakat melalui radio	0,4	970.224.310	
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Radio Sonata	88,40			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Radio Sonata	88,40		
VII	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah daerah Kabupaten/Kota		Prosentase Perangkat Daerah yang menerapkan Keterbukaan Informasi Publik	91%	9.598.903.826	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah daerah Kabupaten/Kota		Prosentase Perangkat Daerah yang menerapkan Keterbukaan Informasi Publik	91%	9.598.903.826
16	Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik		- jumlah layanan penyuluhan dan pengendalian informasi	3 Dokumen	1.166.811.938	Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik		- jumlah layanan penyuluhan dan pengendalian informasi	3 Dokumen	1.166.811.938

17	Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	2 Unit	970.224.310	Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	2 Unit	970.224.310
18	Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	4 Dokumen	3.827.619.015	Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	4 Dokumen	3.827.619.015
19	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas		Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	4 Dokumen	3.634.248.563	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas		Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	4 Dokumen	3.634.248.563
C	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		Nilai Penerapan SPBE lingkup Aplikasi	39,95	1.405.487.072	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		Nilai Penerapan SPBE lingkup Aplikasi	39,95	1.405.487.072
			Nilai Penerapan SPBE lingkup Perencanaan, Evalueasi dan Pengembangan	20,30	623.752.800			Nilai Penerapan SPBE lingkup Perencanaan, Evalueasi dan Pengembangan	20,30	623.752.800
			Nilai Penerapan SPBE lingkup Infrastruktur	4,50	26.375.478.696			Nilai Penerapan SPBE lingkup Infrastruktur	4,50	26.375.478.696
VIII	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota		Jumlah Perangkat Daerah yang terkoneksi jaringan Interkoneksi	60 PD	23.934.000.794	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota		Jumlah Perangkat Daerah yang terkoneksi jaringan Interkoneksi	60 PD	23.934.000.794

20	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah		Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	200 lokasi	23.934.000.794	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah		Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	200 lokasi	23.934.000.794
IX	Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Aplikasi Perangkat Daerah yang terintegrasi	90 Aplikasi	4.470.717.774	Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Aplikasi Perangkat Daerah yang terintegrasi	90 Aplikasi	4.470.717.774
21	Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota		Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E - Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	34 Unit	1.540.473.688	Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota		Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E - Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	34 Unit	1.540.473.688
22	Sub Kegiatan Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintah Berbasis Elektronik		Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	2 dokumen	179.770.800	Sub Kegiatan Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintah Berbasis Elektronik		Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	2 dokumen	179.770.800
23	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi elektronik		Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	4 Aplikasi	247.953.750	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi elektronik		Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	4 Aplikasi	247.953.750

24	Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik		Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	5 Aplikasi	1.157.533.322	Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik		Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	5 Aplikasi	1.157.533.322
25	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah		Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	6 Kegiatan	901.004.214	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah		Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	6 Kegiatan	901.004.214
26	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas		Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	2 Dokumen	170.326.640	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas		Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	2 Dokumen	170.326.640
27	Sub kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	2 Dokumen	273.655.360	Sub kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	2 Dokumen	273.655.360
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				903.097.030	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				903.097.030
D	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		Nilai Penerapan SPBE lingkup Data dan Statistik	3,9	903.097.030	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		Nilai Penerapan SPBE lingkup Data dan Statistik	3,9	903.097.030

X	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah data yang disampaikan kepada masyarakat	1.000 data	903.097.030	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah data yang disampaikan kepada masyarakat	1.000 data	903.097.030
28	Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1 Dokumen	155.449.030	Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1 Dokumen	155.449.030
29	Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi		Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	1 Dokumen	223.432.000	Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi		Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	1 Dokumen	223.432.000
30	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah		Jumlah Data Statistik yang Dihimpun	1 Dokumen	524.216.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah		Jumlah Data Statistik yang Dihimpun	1 Dokumen	524.216.000
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				303.706.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				303.706.000
E	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		Nilai Penerapan SPBE lingkup Data dan Statistik	1,20	303.706.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		Nilai Penerapan SPBE lingkup Data dan Statistik	1,20	303.706.000
XI	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah aplikasi yang terkendali keamanannya	7 Aplikasi	303.706.000	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah aplikasi yang terkendali keamanannya	7 Aplikasi	303.706.000

31	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	7 Aplikasi	303.706.000	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	7 Aplikasi	303.706.000
----	---	---	------------	-------------	---	---	------------	-------------

Sumber : Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Melalui kegiatan Musrenbang mulai dari Tingkat Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kota, PD akan menyerap aspirasi dari masyarakat. Usulan masyarakat sebagian besar umumnya mengajukan usulan mengenai perbaikan sarana prasarana jalan tetapi ada juga sebagian lagi yang mengusulkan kegiatan pada PD teknis yang pada garis besarnya meminta bantuan pelatihan keterampilan dan bantuan peralatan usaha.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung menanggapi usulan masyarakat terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun mendatang dan akan mengakomodir sepanjang sesuai dengan tupoksi Dinas. Usulan-usulan dari hasil Musrenbang akan ditelaah lebih lanjut dengan melakukan klarifikasi ke lokasi yang meminta bantuan bila sesuai dengan kriteria yang dimiliki Dinas maka akan ditindaklanjuti.

Berdasarkan hasil Musrenbang tingkat Kota Bandung Tahun 2024, Dinas Komunikasi dan Informatika tidak ada usulan-usulan dari Musrenbang Tingkat Kecamatan.



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

5.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Seiring dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021, maka Dinas Komunikasi dan Informatika dalam upaya menelaraskan tugas dan fungsi sesuai dengan urusannya.

Ada beberapa kebijakan nasional pada Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan urusannya yaitu Urusan Komunikasi dan Informatika; Urusan Statistik dan Urusan Persandian.

A. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL

1. Pembangunan infrastruktur dan pemanfaatan teknologi informasi komunikasi (TIK) dan penyiaran melalui transformasi digital.
2. Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik dengan strategi:
 - a. Penguatan integrasi tata kelola informasi dan komunikasi public sesuai dengan asas-asas keterbukaan informasi publik.
 - b. Penguatan media-media lokal dan alternative sebagai sumber informasi utama masyarakat,
 - c. Penyediaan konten informasi publik yang berkualitas dan merata, terutama bagi masyarakat di wilayah 3T,
 - d. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia bidang komunikasi dan informasi,

- e. Peningkatan akses partisipasi masyarakat dalam penentuan kebijakan publik secara langsung dan digital,
- f. Peningkatan literasi media masyarakat melalui pendidikan dan pendektan sosial budaya,
- g. Penyusunan standarisasi lembaga pers dan jurnalis,
- h. Peningkatan kualitas isi siaran TV melalui pembentukan rating nasional serta penguatan peran KPI;

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

- 5. Pengembangan e-Government di lingkup Pemerintah daerah.
- 6. Pembinaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi Daerah.
- 7. Pengelolaan dan Penyediaan Informasi melalui media publik dan kemitraan lembaga komunikasi di daerah.

TUJUAN/SASARAN

- 1. Kualitas akses TIK yang merata dengan pemanfaatan yang optimal.
- 2. Terwujudnya komunikasi publik yang efektif, integratif dan partisipatif.

Untuk mendukung kebijakan nasional, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung disesuaikan dengan program/kegiatan yang ada dengan memperhatikan acuan yang telah ditentukan dalam penyusunan RKPD Tahun 2021 sesuai amanat Permendagri Nomor 40 tahun 2020, yaitu;

- 1. Dalam mendukung prioritas nasional kelima yaitu stabilitas keamanan nasional guna meningkatkan akses dan kualitas informasi publik, perlu adanya upaya penatakelolaan bidang komunikasi publik, penyediaan dan pengelolaan informasi dan komunikasi publik bidang politik, hukum, keamanan, perekonomian, maritim, pembangunan manusia dan kebudayaan, serta pengelolaan informasi publik melalui media Pemerintah.
- 2. Dalam rangka pencapaian pembangunan nasional tersebut, arah dan kebijakan pembangunan daerah dilakukan melalui peningkatan kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia bidang Komunikasi di Pemerintah daerah, peningkatan penyebaran informasi publik yang berkualitas melalui media cetak, media elektronik, media luar ruang, media tatap

muka, pertunjukan rakyat, internet, kemitraan dengan komunitas informasi dan komunikasi publik serta media yang dimiliki Pemerintah daerah. Dengan ini maka dalam penyusunan RKPD Tahun 2021 Pemerintah daerah perlu memperhatikan isu-isu sebagai berikut:

- a. Penyebaran informasi pencegahan stunting. Jaminan Kesehatan Nasional;
 - b. Penguatan karakter kebangsaan; dan
 - c. Deradikalisasi.
3. Dalam melaksanakan pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik, Pemerintah daerah memperhatikan:
- a. Seluruh anggaran belanja TIK di lingkungan Pemerintah daerah agar berada di satu rekening dinas yang melaksanakan urusan komunikasi dan informatika.
 - b. Infrastruktur TIK yang terintegrasi, seperti server pengolah data dan jaringan komunikasi data.
 - c. Selama belum ada kebijakan yang mengatur, pembangunan aplikasi umum di Pemerintah daerah agar menggunakan atau mengadopsi aplikasi serupa yang sudah digunakan di pusat atau daerah lain.
 - d. Integrasi data di lingkungan Pemerintah daerah di bawah koordinasi dinas yang melaksanakan urusan komunikasi dan informatika untuk dapat diakses secara berbagi pakai oleh seluruh SKPD; dan
 - e. Peningkatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia bidang TIK di lingkungan Pemerintah daerah baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

B. URUSAN STATISTIK

PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL

Pembangunan Manusia. Guna Mendukung Dimensi Pembangunan Manusia, BPS akan melaksanakan Sensus Penduduk 2020 dengan fokus pembangunan: Satu data kependudukan Indonesia

TUJUAN/SASARAN

Menyediakan data penduduk dan perumahan yang mencakup jumlah,

distribusi, komposisi, dan karakteristiknya, serta^[1] menjadi menuju satu data kependudukan Indonesia

Upaya untuk mendukung kebijakan pembangunan nasional ini, Dukungan Pemerintah daerah dalam Sosialisasi Sensus Penduduk 2020, guna suksesnya pelaksanaan Sensus Penduduk 2020.

C. URUSAN PERSANDIAN

PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL

Menguatnya Stabilitas Polhukhankam dan Terlaksananya Transformasi Pelayanan Publik Hal ini diwujudkan dengan:

1. Pembangunan dan Penguatan *Computer Security Incident Response Team* (CSIRT);
2. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Keamanan Siber.

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pelaksanaan urusan Pemerintah daerah Bidang persandian meliputi:

1. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Yang dilaksanakan melalui:
 - a. Penyusunan kebijakan pengamanan informasi^[1]
 - b. Pengelolaan sumber daya^[1]keamanan informasi^[1]
 - c. Pengamanan sistem elektronik dan pengamanan informasi nonelektronik
 - d. Penyediaan layanan keamanan informasi

TUJUAN/SASARAN

Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional dengan indikatornya adalah Meningkatnya skor Indonesia dalam *Global Cybersecurity Index*.

Keselarasan kinerja untuk mendukung kebijakan pembangunan nasional ini, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung dengan beberapa program dan kegiatannya yaitu;

1. Dukungan pemerintah daerah dalam kegiatan penguatan *incident response team* sektor pemerintah adalah sebagai berikut:
2. Dukungan Formasi Sumber Daya Manusia yang akan ditunjuk bertugas dalam CSIRT: khusus menjalankan fungsi CSIRT (*dedicated*); atau mendelegasikan staf yang menjadi admin TI.
3. Dukungan APBD untuk Jaldis mengikuti pelatihan, FGD, asistensi pembentukan CSIRT, dan/atau *Drill Test* di pusat. [1] [SEP]
4. Dukungan dokumen waktu, dan tempat untuk asistensi pembentukan CSIRT sektoral di lingkungan pemerintah daerah. [1] [SEP]
5. Dukungan ketetapan dalam Peraturan Gubernur tentang kebijakan tata kelola CSIRT, SOP operasional CSIRT, susunan tim CSIRT, dan layanan CSIRT yang [1] [SEP] dinyatakan dalam RFC 2350, berikut dukungan anggaran operasional CSIRT dan honorarium Tim CSIRT dan lain-lain.

5.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.

Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informasi dalam melaksanakan sasaran dan target kinerja Renstra Perangkat Daerah berdasarkan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bandung Tahun 2024-2026.

Adapun Tujuan dan Sasaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung Tahun 2024 memiliki target kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1**Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024**

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	REALISASI	TARGET	
			2022	2023	2024
1	Terwujudnya peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE/Smart City)	B	B	B
1.1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis e-government	Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,61	3,35	Sangat Baik (3,50)
2	Terwujudnya Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Diskominfo	Hasil survai layanan Kepuasan Masyarakat	85,53	88,31	88,40
2.1	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Diskominfo	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,53	88.31	88,40

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika



BAB IV

RENCANA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja Tahun 2024 dan pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mencapai visi dan misi Kepala Daerah yang telah dituangkan dalam RPD Kota Bandung Tahun 2024-2026, Dinas Komunikasi dan Informatika melalui program dan kegiatan yaitu;

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - a. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. Kegiatan Administrasi Kepagawaian Perangkat Daerah;
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - e. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - f. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu;
 - g. Sub Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sum Daya Air dan Listrik;
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

6. Kegiatan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan;
 - b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya.

II. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

1. Kegiatan Penyampaian Komunikasi dan Informasi Publik
 - a. Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik;
 - b. Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik;
 - c. Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik;
 - d. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas.

III. PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA

1. Kegiatan Pengelolaan Nakma Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;
 - a Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
2. Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - a. Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota;
 - b. Sub Kegiatan Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintah Berbasis Elektronik;
 - c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi elektronik;
 - d. Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - e. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah;
 - f. Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas;

- g. Sub kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah.

IV. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

1. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota;
 - a. Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral Kegiatan Perencanaan Teknologi Informasi dan Komunikasi ;
 - b. Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi;
 - c. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah.

V. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

1. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sebagai rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung Tahun 2022 dan prakiraan maju Tahun 2023, maka dapat di lihat pada Tabel 5 di bawah ini;

Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kota Bandung

DINAS KOMINIKASI DAN INFORMATIKA

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Pagu Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun 2025				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR											
2	16	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										
2	16	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Bandung	100%	APBD	100%				
2	16	01	2.01	Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bandung	1 Sub Kegiatan	APBD	1 Sub Kegiatan			
2	16	01	2.01	07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bandung	2 Dokumen	135.213.540	APBD	2 Dokumen	148.734.894
2	16	01	2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Kota Bandung	12 Laporan		APBD	12 Laporan	

2	16	01	2.02	01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bandung	12 Dokumen	15.878.808.918	APBD		12 Dokumen	17.466.689.810
2	16	01	2.05		Kegiatan Administrasi Kepagawaian Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Kepagawaian Perangkat Daerah	Kota Bandung	1 Sub Kegiatan		APBD		1 Sub Kegiatan	
2	16	01	2.05	02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Bandung	1 paket	183.589.870	APBD		1 paket	201.948.857
2	16	01	2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Bandung	7 Sub Kegiatan		APBD		7 Sub Kegiatan	
2	16	01	2.06	02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bandung	12 laporam	529.984.879	APBD		12 laporam	582.983.367
2	16	01	2.06	03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Bandung	4 paket	151.887.294	APBD		4 paket	167.076.023
2	16	00	2.06	04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kota Bandung	5 paket	159.090.622	APBD		5 paket	174.999.684
2	16	00	2.06	05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan pengadaan yang Disediakan	Kota Bandung	2 paket	95.080.500	APBD		2 paket	104.588.550
2	16	01	2.06	06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Bandung	12 laporam	77.832.660	APBD		12 laporam	85.615.926
2	16	01	2.06	08	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan bulanan Penyediaan Makanan Dan Minuman Tamu	Kota Bandung	12 laporam	244.892.500	APBD		12 laporam	269.381.750
2	16	01	2.06	09	Sub Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bandung	12 laporam	359.499.500	APBD		12 laporam	395.449.450

2	16	01	2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sub Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bandung	2 Sub Kegiatan				2 Sub Kegiatan	
2	16	01	2.08	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Bandung	12 laporam	111.370.000	APBD		12 laporam	122.507.000
2	16	01	2.08	04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan layanan kebersihan dan keamanan kantor	Kota Bandung	12 laporam	1.824.802.128	APBD		12 laporam	2.007.282.341
2	16	01	2.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sub Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bandung	3 Sub Kegiatan			APBD	3 Sub Kegiatan	
2	16	01	2.09	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Yang Dibayarkan Jasa pemeliharaan dan Perijinannya	Kota Bandung	28 Unit	895.044.100	APBD		28 Unit	984.548.510
2	16	01	2.09	06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah laporan unit perbaikan peralatan kantor	Kota Bandung	12 laporam	143.811.940	APBD		12 laporam	158.193.134
2	16	01	2.09	09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah unit Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung	Kota Bandung	1 Unit	249.343.296	APBD		1 Unit	274.277.626
							Kota Bandung				APBD		
2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Nilai Penerapan SPBE lingkup Layanan Informasi	Kota Bandung	2,4		APBD		3,0	
						Cakupan pengaduan masyarakat melalui LAPOR yang ditindaklanjuti	Kota Bandung	100%		APBD		100%	

						Nilai layanan informasi masyarakat melalui radio	Kota Bandung	0,4		APBD		0,4	
						Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Radio Sonata	Kota Bandung	88,40		APBD		88,50	
2	16	02	2.01		Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Perangkat Daerah yang menerapkan Keterbukaan Informasi Publik	Kota Bandung	91%		APBD		92%	
2	16	02	2.01	02	Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	- jumlah layanan penyuluhan dan pengendalian informasi	Kota Bandung	3 Dokumen	857.610.000	APBD		3 Dokumen	943.371.000
2	16	02	2.01	05	Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kota Bandung	2 Unit	662.022.100	APBD		4 Dokumen	728.224.310
2	16	02	2.01	06	Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Kota Bandung	4 Dokumen	1.876.313.906	APBD		4 Dokumen	2.063.945.297
2	16	02	2.01	12	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Kota Bandung	4 Dokumen	1.319.272.000	APBD		4 Dokumen	1.451.199.200
2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Nilai Penerapan SPBE lingkup Aplikasi	Kota Bandung	39,95		APBD		40,25	
						Nilai Penerapan SPBE lingkup Perencanaan, Evalueasi dan Pengembangan	Kota Bandung	20,30		APBD		22,80	
						Nilai Penerapan SPBE lingkup Infrastruktur	Kota Bandung	4,50		APBD		4,80	

2	16	03	2.01		Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang terkoneksi jaringan Interkoneksi	Kota Bandung	60 PD			60 PD	
2	16	03	2.01	03	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kota Bandung	200 lokasi	2.261.148.429	APBD	200 lokasi	2.487.263.272
2	16	03	2.02		Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Aplikasi Perangkat Daerah yang terintegrasi	Kota Bandung	90 Aplikasi		APBD	94 Aplikasi	
2	16	03	2.02	01	Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E - Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bandung	34 Unit	951.000.624	APBD	34 Unit	1.046.100.686
2	16	03	2.02	02	Sub Kegiatan Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintah Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kota Bandung	2 dokumen	313.428.000	APBD	2 dokumen	344.770.800
2	16	03	2.02	06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Kota Bandung	4 Aplikasi	343.239.500	APBD	4 Aplikasi PD	377.563.450
2	16	03	2.02	07	Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Kota Bandung	5 Aplikasi	1.055.883.020	APBD	5 Aplikasi	1.161.471.322

2	16	03	2.02	08	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Kota Bandung	6 Kegiatan	2.330.507.500	APBD	6 Kegiatan	2.563.558.250
2	16	03	2.02	09	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	Kota Bandung	2 Dokumen	404.842.400	APBD	2 Dokumen	445.326.640
2	16	03	2.02	10	Sub kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Kota Bandung	2 Dokumen	298.777.600	APBD	2 Dokumen	328.655.360
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					APBD		
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Nilai Penerapan SPBE lingkup Data dan Statistik	Kota Bandung	3,9		APBD	3,9	
2	20	02	2.01		Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data yang disampaikan kepada masyarakat	Kota Bandung	1.000 data		APBD	1.000 data	
2	20	02	2.01	01	Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kota Bandung	1 Dokumen	884.924.100	APBD	1 Dokumen	973.416.510

2	20	02	2.01	02	Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Kota Bandung	1 Dokumen	284.310.000	APBD	1 Dokumen	312.741.000
2	20	02	2.01	06	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik yang Dihimpun	Kota Bandung	1 Dokumen	486.127.360	APBD	1 Dokumen	534.740.096
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN		Kota Bandung			APBD		
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Nilai Penerapan SPBE lingkup Data dan Statistik	Kota Bandung	1,20		APBD	1,20	
2	21	02	2.01		Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aplikasi yang terkendali keamanannya	Kota Bandung	7 Aplikasi		APBD	7 Aplikasi	
2	21	02	2.01	04	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Kota Bandung	7 Aplikasi	808.801.700	APBD	7 Aplikasi	889.681.870
					JUMLAH				36.178.459.986			39.796.305.985

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika



BAB IV PENUTUP

Rencana Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung Tahun 2024 merupakan bentuk penjabaran tahunan dari Rencana Strategis 2024 – 2026 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung khususnya Urusan Komunikasi dan Informatika dan memantapkan tatakelola pemerintah daerah yang baik. Rencana Kerja ini disusun untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis beserta target yang ingin dicapai.

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung Tahun 2024 disusun dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam rangka menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan maupun pengawasan program/ kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis.

Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya masih harus sering dievaluasi. Diharapkan dengan evaluasi yang terus berjalan secara sistematis. Seluruh jajaran Diskominfo dapat menunjukkan kinerja yang memuaskan dan meyakinkan masyarakat bahwa keberadaan Diskominfo Kota Bandung merupakan aset yang berharga bagi terlaksananya otonomi daerah.

Dengan telah tersusunnya Rencana Kerja Tahunan ini maka Diskominfo Kota Bandung harus segera melakukan peningkatan kualitas SDM bidang Informasi dan Komunikasi karena Dinas Komunikasi dan Komunikasi merupakan pintu gerbang Informasi Pemerintah Kota Bandung

dengan senantiasa menyediakan Informasi yang dibutuhkan masyarakat baik yang berskala lokal, regional dan nasional juga sebagai Dinas yang menjalin Komunikasi timbak balik yang seimbang, aspiratif dan efektif sesuai dengan paradigma baru yang ada.

Adanya Rencana Kerja Tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika diharapkan dapat memacu kinerja aparat sehingga tercipta hasil kerja yang optimal dan dapat dipertanggung jawabkan.

Bandung, 9 Agustus 2023

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA**

